BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Pada awal berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi bersamaan dengan munculnya Era Otonomi daerah sebagai respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, nemun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.

Oleh karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan,

dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut adanya beberapa perubahan baru dan penyesuaian serta pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom serta peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah Dinas Provinsi Jawa Barat kemudian di sesuaikan kembali dengan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Provinsi Jawa Barat merupakan penggabungan dari kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional Jawa Barat yang berkantor di jalan Dr. Radjiman No 06 Bandung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai dengan

kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di Tetapkan Di Jalan Dr.Radjiman No.06 Bandung.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (DISDIK JABAR) adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat (PEMPROV) serta dibawah oleh Kementrian Pendidikan Nasional. DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang berhubungan dengan Dunia Pendidikan di wilayah Provinsi.

1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jabar

Visi dan Misi perusahaan/instansi adalah sebagai tujuan yang ingin dicapai perusahaan/instansi dalam meningkatkan perusahaannya, yang dilakukan melalui aktivitas kerja yang harus diwujudkan oleh seluruh SDM yang ada didalamnya. Visi dan Misi juga menentukan arah kerja sebuah perusahaan/instansi untuk mencapai tujuannya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempunyai arah tujuan, yaitu :

1.2.1 Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

"Akserasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak Mulia Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera".

Penjelasan tentang arti atau makna dari kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut :

- AKSELERASI, adalah suatu upaya untuk dapat mencapai kondisi tertentu secara lebih cepat. PEMBANGUNAN, asal katanya adalah "MEMBANGUN" yang mengandung arti "membentuk, mendirikan, atau mewujudkan". Dengan demikian, PEMBANGUNAN dalam hal ini diartikan sebagai "aktivitas untuk membentuk, mendirikan dan mewujudkan sesuatu ke arah yang lebih baik".
- SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), adalah sebagai suatu konsep yang dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- CERDAS, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi potensi manusia yang mampu mendayagunakan atau mensinergikan kemampuan/kecerdasan emosional, akademis/intelektual, dan spritual menjadi kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan kesulitan, persoalan, dan masalah yang dihadapi.
- BERAKHLAK MULIA, yaitu suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi memiliki kepribadian sesuai tuntunan agama, norma dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, BERAKHLAK MULIA berarti SDM Jawa Barat dalam perilakunya berlandaskan kepada tuntunan agama, norma-norma yang berlaku disekitarnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- MENGUASAI IPTEK, adalah suatu istilah yang mengandung arti memahami dan mampu menjalankan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, MENGUASAI IPTEK diartikan sebagai suatu kondisi SDM Jawa Barat memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupannya.

- BERDAYA SAING, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenangkan sebuah kompetisi/perlombaan. Dengan demikian, BERDAYA SAING berarti SDM Jawa Barat memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan/lapangan kerja.
- MENUJU, yaitu kata sambung yang menunjukan keterkaitan antara konsep "Akselerator Pembangunan" dengan tujuan akhir dari keunggulan yang ingin diwujudkan. TERWUJUDNYA, adalah satu kata yang mengandung arti "dapat di" wujudkannya, dapat direalisasikannya, dan dapat diimplementasikan menjadi sesuatu. MASYARAKAT JAWA BARAT, yaitu seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat.
- MANDIRI, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berdiri sendiri atau tidak tergantung pada orang atau pihak lain. Dengan demikian, MANDIRI disini diartikan SDM Jawa Barat memiliki suatu kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain.
- SEJAHTERA, adalah suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi aman, sentosa dan makmur, selamat terbebas dari segala macam

gangguan, kesukaran dsb. Dengan demikian, SEJAHTERA disini diartikan bahwa SDM Jawa Barat memperoleh dan merasakan kemakmuran serta terlepas dari segala macam kesukaran hidup.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : "Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang memiliki kemampuan untuk menjadi akselerator (pemercepat) dalam membentuk atau mewujudkan penduduk Jawa Barat menjadi manusia yang : (1) memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual; (2) berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK; (4) memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan; (5) memiliki kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain; dan (6) memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Jawa Barat yang makmur dan terlepas dari segala kesukaran hidup.

1.2.2 Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan misi, yaitu :

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya Good Governance Bidang Pendidikan.
2. Meningkatkan Upaya-upaya Pemerataan Dan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan Secara Efisien Dan Efektif.

1.3 Moto Dinas Pendidikan Jawa Barat

Dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu instansi yang berada dibawah naungan Provinsi Jawa Barat, maka moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sama seperti halnya moto Jawa Barat yaitu, Gemah Ripah Repeh Rapih, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

• *Gemah-ripah* : subur makmur, cukup sandang dan pangan.

• *Repeh-rapih* : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur

makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai. (Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

1.4 Logo Dinas Pendidikan Jawa Barat

Setiap perusahaan/Instansi mempunyai logo masing-masing untuk membedakan dan menjadi salah satu karakter atau cirri dari perusahaan/istansi tersebut. Berikut adalah logo dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1

Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Juli 2012

1.5 Arti Lambang

Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.

1.6 Sejarah Divisi PNFI dan Subbagian Kepegawaian Umum (Humas)

A. PNFI

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensu peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU Nomor 20 tahun 2003).

Secara Konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelanggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih.

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah merupakan pembinaan terhadap kursus dan lembaga PNFI melalui proses pembelajaran dan manajemen kelembgaan PNFI sehinga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global.

B. Kepegawaian Umum (Humas)

Divisi Subbag Kepegawaian dan Umum lahir seiring dirubahnya nama Kanwil Depdikbud menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berada dibawah Bagian Sekretaris, Sub Bagian Kepegawaian Umum mempunyai sub dibawahnya yaitu Humas & Hukum, Persuratan/Kearsipan, Kepegawaian, Poliklinik, Koperasi, Kendaraan yang masing-masing sub bagian tersebut memiliki koordinator tersendiri didalamnya.

Semenjak melakukan kerja praktek di Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat, Penulis diberi kesempatan untuk melakukan kerja praktek di bagian Humas yang berada di bawah Divisi Subbag Kepegawaian dan Umum. Berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya, Humas yang ada di Instansi masih bersifat tidak melembaga atau dikenal dengan istilah Method Of Communication, yang menjadikan tugas seorang Humas di sebuah instansi tidak begitu diunggulkan dalam menjaga sebuah citra instansi terkait atau menjalankan fungsi kehumasan.

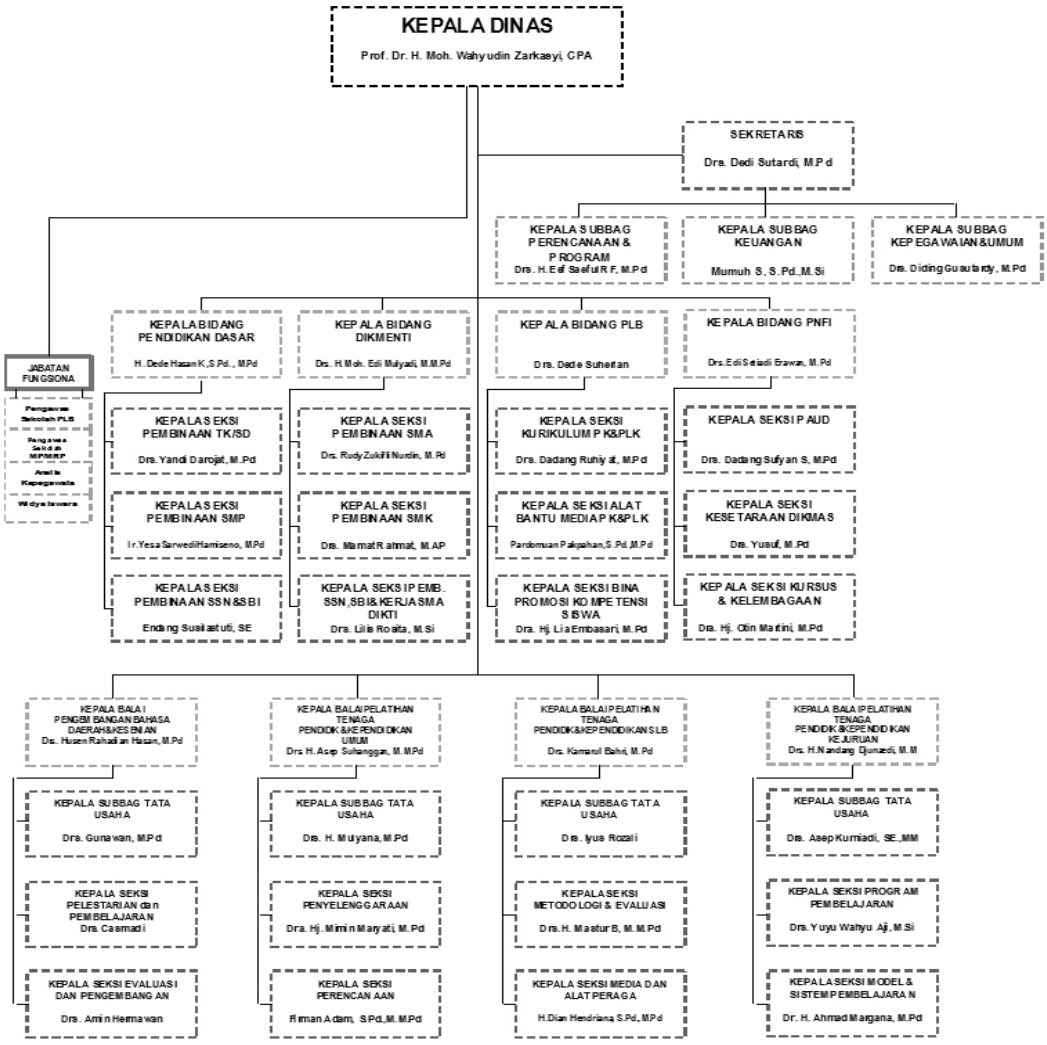
Dengan adanya hal tersebut, menjadikan sub divisi Humas ini tidak begitu terorganisir dalam menjalankan tugas kehumasannya. Akan tetapi, pada dasarnya kegiatan seorang Humas yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat di jelaskan sebagai berikut :

1.7 Struktur Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Untuk birokrasi kerja yang teratur setiap instansi atau perushaan memerlukan adanya strukur, demikian juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berikut gambar struktur instansi tersebut :

Gambar 1.2

Struktur Instansi Disdik Jabar



(Sumber: Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Dikmenti, Kepala Bidang PLB, Kepala Bidang PNFI. Kemudian Sekretaris membawahi Kepala Subbag Perencanaan & Program, Kepala Subbag Keuangan dan Kepala Subbag Kepegawaian & Umum. Sub Bagian Kepegawaian Umum mempunyai sub dibawahnya yaitu Persuratan/Kearsipan, Kepegawaian, Poliklinik, Koperasi, Kendaraan, Humas & Hukum, yang masing-masing sub bagian tersebut memiliki koordinator tersendiri didalamnya.

1.8 Job Deskription Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.
b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.

d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
e. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
f. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan dasar.
g. Seksi Pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan TK dan SD.
h. Seksi Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMP.
i. Seksi Pembinaan SSN dan SBI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN dan SBI.
j. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi.
k. Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.
l. Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMK.
m. Seksi Pembinaan SSN, SBI dan Kerjasama DIKTI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN/SKM, SBI dan kerjasama DIKTI.

n. Bidang Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan luar biasa.
o. Seksi Kurikulum PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kurikulum PK dan PLK.
p. Seksi Alat Bantu Media PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi alat bantu media PK dan PLK.
q. Seksi Bina Promosi Kompetensi Siswa mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi bina promosi kompetensi siswa.
r. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan non formal dan informal.
s. Seksi PAUD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan anak usia dini.
t. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
u. Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kursus dan kelembagaan.

1.9 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah instansi dalam menunjang pekerjaan pegawai instansi dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain :

1.9.1 Sarana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berkantor pusat di Jalan Dr. Radjiman No. 6, Bandung memiliki beberapa Gedung serta halaman yang luas dan Lapangan Tennis Outdoor sebagai sarana olahraga. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki 3 gedung yang terdiri dari 5 lantai. Gedung pertama adalah gedung utama yang digunakan oleh beberapa bagian / divisi seperti ruangan Kepala Dinas dan Protokoler, ruangan Subbag Kepegawaian dan Umum, ruangan Humas dan Hukum, ruangan Subbag Perencanaan dan Program, Subbag Keuangan, serta ruangan Seni Budaya Daerah yang tepat berada di awal pintu masuk utama.

Adapun rincian mengenai sarana yang dimilik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain :

Tabel 1.1

Sarana di Lingkungan Disdik Jabar

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Memiliki gedung tempat perkantoran	3 Unit
2	Memiliki fasilitas lapangan olahraga tennis outdoor.	2 Unit
3	Memiliki ruangan kantin pegawai.	2 Unit
4	Memiliki kendaraan dinas roda empat.	19 Unit
5	Memiliki kendaraan dinas roda dua	15 Unit
6	Memiliki ruang (rapat humas dan hukum)	1 Unit

Sumber : Arsip Penulis 2012

1.9.2 Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Prasarana yang dimilik oleh bagian Humas dan Hukum Dinas Pendidikan Jawa Barat antara lain :

Tabel 1.2

Prasarana Humas dan Hukum Disdik Jabar

No	Nama Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kompoter	3 Unit	Digunakan sebagai penunjang untuk pembuatan tulisan, menyimpan file arsip dan dokumentasi foto & video.
2	Printer	1 Unit	Digunakan untuk mencetak hasil tulisan maupun draft kliping berita Disdik Jabar.
3	Paper shredder straight cut	1 Unit	Digunakan sebagai pembuangan kertas yang tidak dipakai atau ada kesalahan cetakan dengan sistem alat yang memotong kertas dengan rapih.
4	Mesin tik	1 Unit	Digunakan hanya sebatas untuk mengetik isian kwitansi dan sebagainya.

No	Nama Prasarana	Jumlah	Keterangan
5	Televisi	1 Unit	Sebagai Hiburan pegawai Humas dan PNFI disela-sela kerja.
6	Meja / kursi kerja	7 Unit	Digunakan sebagai penunjang untuk komputer, printer, mesin tik serta penyimpanan sementara Surat Kabar yang akan dibaca.
7	Lemari besi	2 Unit	Digunakan untuk penyimpanan arsip Humas Disdik Jabar seperti arsip kliping berita, peralatan dokumentasi, dan file-file pegawai.
8	Loker besi	3 Unit	Digunakan untuk penyimpanan keperluan pegawai seperti kertas HVS, Kop Surat Disdik Jabar dll.
9	Dispenser	1 Unit	Sebagai penunjang bagi pegawai Humas dan pengunjung, serta wartawan.

No	Nama Prasarana	Jumlah	Keterangan
11	Camera	2 Unit	Digunakan untuk keperluan dokumentasi acara yang berhubungan dengan Disdik Jabar.
10	Lemari perlengkapan	1 Unit	Digunakan untuk menyimpan perlengkapan untuk penunjang kerja pegawai sepeti gelas, piring / mangkuk, sendok, serta konsumsi seperti the dan kopi.
12	Handycam	1 Unit	Digunakan untuk merekam aktivitas kegiatan Acara Disdik Jabar baik internal maupun eksternal.
13	Gantungan Koran	1 Unit	Digunakan untuk menyimpan surat kabar yang akan dibaca oleh pegawai Humas Didik Jabar maupun tamu / wartawan.
14	AC	1 Unit	Sebagai penunjang kenyamanan dalam bekerja khususnya di ruang PNFI Disdik Jabar.

Sumber : Arsip Penulis, Juli 2012

1.10 Lokasi dan Waktu PKL

1.10.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tepatnya beralamat di Jalan Dr. Radjiman No. 6 Bandung.

Telp : (022) 4264813

Fax : (022) 4624881

Web : www.disdik.jabarprov.go.id

1.10.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan selama 3 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012. Setiap hari Senin s/d Jum'at, mulai Pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai.